

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Firdausi, (2020), Pembangunan ekonomi terjadi ketika situasi keuangan suatu negara terus membaik dari waktu ke waktu. Suatu perekonomian dianggap maju ketika tingkat aktivitasnya melampaui apa yang dicapai dalam jangka waktu terakhir. Pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara merupakan hasil dari interaksi berbagai kelompok variable diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, modal, dan lain-lain. Oleh karena itu, peran manusia sangat penting dalam proses ini. Manusia berfungsi sebagai tenaga kerja, sebagai input dalam pembangunan, sekaligus sebagai konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri. Salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja, yang seringkali terjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk usia kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, hal ini dapat menyebabkan pengangguran. Akibatnya, akan muncul ketidakstabilan ekonomi yang akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan lainnya.

Penyerapan tenaga kerja merupakan aspek paling dasar dalam kehidupan manusia, mencakup unsur ekonomi dan sosial. Tenaga kerja menjadi penggerak utama dalam aktivitas ekonomi, bertindak sebagai elemen penting yang sangat berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Semakin banyak kesempatan

kerja yang tersedia, semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan dan kemajuan kegiatan ekonomi Masyarakat (Julia Dwi Budiasih & Kiky Asmara, 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil berbagai Langkah untuk meningkatkan peluang kerja, seperti memperbaiki kualitas tenaga kerja, membangun wilayah-wilayah yang masih kurang berkembang, dan berbagai Upaya lainnya. Presentase tingkat ketenagakerjaan bisa menggambarkan kondisi sosial di wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Humiati & Budiarti, (2020), Penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai sangat penting untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu keharusan, karena menjadi dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan. Apabila tenaga kerja yang melimpah dapat dikelola, dibina, dan dioptimalkan dengan baik, maka potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini akan menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif, yang pada akhirnya menjadi modal berharga dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2023, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 41 juta jiwa, dengan rincian 20.894.359 laki-laki dan 21.025.547 perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut lebih dari 70% atau sekitar 28,29 juta jiwa termasuk dalam kategori usia produktif (15-64 tahun) (BPS, 2023). Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berkontribusi dalam kegiatan produksi dan mendorong

pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk perlu diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja guna mencegah peningkatan tingkat pengangguran yang dapat menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja di Jawa Timur Tahun 2010-2024

TAHUN	Jumlah Tenaga Kerja
2010	18.698.108
2011	18.940.340
2012	19.081.995
2013	19.266.457
2014	19.306.508
2015	19.367.777
2016	19.114.563
2017	20.099.220
2018	20.449.949
2019	21.032.612
2020	20.962.967
2021	21.037.750
2022	21.613.293
2023	22.703.177
2024	23.236.078

Sumber: Jumlah Tenaga Kerja di Jawa Timur, BPS

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2024. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja tercatat sebanyak 18.698.108 orang, dan meningkat menjadi 23.236.078 orang pada tahun 2024. Secara total, terjadi penambahan sekitar 4,5 juta tenaga kerja dalam 15 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 324 ribu orang per tahun.

Menurut Wiraja & Marwan, (2023), Salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah Upah Minimum Regional (UMR), yang memiliki dampak signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. UMR merupakan

salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah di berbagai provinsi di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dengan menetapkan batas minimum upah. Kebijakan UMR yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sering kali menghadapi dilema bagi sektor usaha. Ketika upah meningkat, pelaku usaha cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap sebagai upaya untuk menekan biaya produksi dan memaksimalkan pendapatan.

Menurut Choirunnisa & Khoirudin, (2024), Seiring dengan meningkatnya nilai upah minimum, tingkat konsumsi pekerja juga akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong permintaan terhadap barang dan jasa. Peningkatan permintaan ini akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja pun bertambah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan upah dapat memberikan dampak positif terhadap peluang kerja.

Tabel 2. Upah Minimum di Jawa Timur Tahun 2010-2024

TAHUN	Upah Minimum (Rupiah)
2010	630.000
2011	705.000
2012	745.000
2013	866.250
2014	1.000.000
2015	1.000.000
2016	1.273.490
2017	1.388.000
2018	1.508.894
2019	1.630.059
2020	1.768.777
2021	1.868.777
2022	1.891.567
2023	2.040.244
2024	2.165.244

Sumber: Upah Minimum Jawa Timur, BPS

Dari data pada Tabel 2, menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2010 hingga 2024. Pada tahun 2010, UMP ditetapkan sebesar Rp630.000 dan terus meningkat hingga mencapai Rp2.165.244 pada tahun 2024. Secara total, terjadi kenaikan sebesar Rp1.535.244 dalam kurun waktu 15 tahun. Kenaikan UMP tertinggi terjadi antara tahun 2012 ke 2013 dan dari tahun 2021 ke 2022. Pada periode 2013, upah meningkat dari Rp745.000 menjadi Rp866.250, sedangkan pada 2022, terjadi lonjakan dari Rp1.868.777 menjadi Rp1.891.567, dan terus naik signifikan di tahun-tahun berikutnya hingga menyentuh angka di atas dua juta rupiah.

Menurut Komang et al., (2021), Pertumbuhan Ekonomi juga dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin pesat pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula kemampuan untuk menyerap tenaga kerja. pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi seperti produksi dan konsumsi pada suatu negara. Bisnis biasanya akan meningkat Ketika ekonomi berjalan dengan baik, dapat menambah lapangan kerja dan meningkatkan kebutuhan akan pekerja. Meningkatkan investasi yang di sebabkan oleh pertumbuhan ekonomi akan mendorong ekspansi perusahaan di berbagai sektor termasuk industri, jasa, dan pertanian, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan tenaga kerja. Untuk mengetahui berapa jumlah pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dari 15 tahun terakhir dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur Tahun 2010-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2010	6.73
2011	6.79
2012	6.85
2013	6.9
2014	7.05
2015	5,44
2016	5,57
2017	5,46
2018	5,47
2019	5,53
2020	2,33
2021	3,56
2022	5,34
2023	4,95
2024	4,93

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur, BPS

Berdasarkan data pada Tabel 3, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menunjukkan tren yang cukup tinggi pada periode 2010 hingga 2014, dengan capaian tertinggi sebesar 7,05% pada tahun 2014. Namun, sejak tahun 2015 hingga 2019, laju pertumbuhan mulai melambat dan cenderung stabil pada kisaran 5,4% hingga 5,5%. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 2,33%. Setelah itu, perekonomian mulai mengalami pemulihan secara bertahap, meningkat menjadi 3,56% pada tahun 2021 dan mencapai 5,34% pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 4,95% dan 4,93%, hal ini mencerminkan kondisi perekonomian yang mulai menunjukkan stabilitas.

Menurut Agustin, (2020), Penyerapan tenaga kerja umumnya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan, salah satunya dengan rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu, pendidikan menjadi

salah satu faktor utama dalam meningkatkan kapasitas suatu negara berkembang untuk menghasilkan pengetahuan baru, memanfaatkan teknologi modern, serta menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam mendorong munculnya ide-ide kreatif dan inovatif. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan baik kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Menurut Hasmawati et al., (2021), Pendidikan adalah sarana yang sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan. Melalui Pendidikan, seseorang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian mereka. Dengan adanya peningkatan di bidang Pendidikan dan Upaya maksimal dalam produktivitas, kualitas tenaga kerja juga akan mengalami perubahan yang signifikan. Tujuan utama dari Pendidikan adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar siap berkontribusi di berbagai bidang pekerjaan. Secara umum, tujuan utama pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi agar mampu berkontribusi secara optimal di berbagai sektor pekerjaan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai landasan strategis dalam menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

Tabel 4. Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur Tahun 2010-2024

Tahun	Rata-rata lama sekolah (Tahun)
2010	6,73
2011	6,79
2012	6,85
2013	6,9
2014	7,05
2015	7,14
2016	7,23
2017	7,34
2018	7,39
2019	7,59
2020	7,78
2021	7,88
2022	8,03
2023	8,11
2024	8,11

Sumber: Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur, BPS

Berdasarkan pada Tabel 4, secara keseluruhan, selama periode tahun 2010 hingga 2024, rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 1,38 tahun, yakni dari 6,73 tahun menjadi 8,11 tahun. Capaian ini merupakan indikator positif atas keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, khususnya dalam hal perluasan akses dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dasar dan menengah. Meskipun demikian, angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,11 tahun masih berada jauh di bawah target ideal selama 12 tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam program wajib belajar hingga jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Kondisi ini menjadi tantangan serius

dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengarahkan fokus kajian terhadap isu-isu utama terkait variabel penelitian serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi fenomena yang dikaji.

1. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur?
3. Apakah tingkat pendidikan masyarakat di Jawa Timur berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja?
4. Apakah pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh upah minimum regional terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur
- 4) Untuk mengetahui pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur

2. Manfaat

Adapun manfaat hendak dicapai pada penelitian sebagai berikut:

1) Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terutama dalam mendukung pengembangan kajian ilmiah di bidang ekonomi pembangunan dan permasalahan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan informasi untuk menambah wawasan tentang Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur.

2) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian mampu memberikan manfaat untuk bahan rujukan dalam proses belajar dan peningkatan pengetahuan, khususnya dalam menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian mampu memberikan manfaat untuk bahan rujukan dalam proses belajar dan peningkatan pengetahuan, khususnya dalam menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Penyerapan Tenaga Kerja

a. Teori Klasik Adam Smith

Teori klasik berpendapat bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa alam tidak memiliki makna jika tidak ada sumber daya manusia yang mampu mengelolanya sehingga menjadi bermanfaat bagi kehidupan. Dalam konteks ini, teori klasik yang diusung oleh Adam Smith (1729-1790) menunjukkan bahwa alokasi sumberdaya manusia yang efektif adalah kunci awal bagi pertumbuhan ekonomi (Puspita et al., 2021). Setelah ekonomi mengalami pertumbuhan, maka akumulasi modal fisik menjadi diperlukan untuk mempertahankan kelanjutan pertumbuhan tersebut. Dengan demikian, efisiensi dalam alokasi sumber daya manusia menjadi syarat yang mendasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Michael P.Todaro

Michael P.Todaro berpandangan bahwa jumlah penawaran tenaga kerja selalu seimbang dengan permintaan tenaga kerja, dengan asumsi bahwa seluruh pelaku memiliki informasi yang sempurna mengenai kondisi pasar tenaga kerja. Keadaan ketika penawaran dan permintaan tenaga kerja berada dalam keseimbangan disebut sebagai titik ekuilibrium (Zahroh et al., 2021). Pada kondisi ini, tidak terjadi pengangguran karena seluruh tenaga kerja yang tersedia dapat

terserap sepenuhnya. Namun, dalam realitasnya, titik ekuilibrium tersebut sulit untuk dicapai, mengingat informasi yang tersedia tidak pernah sepenuhnya sempurna serta terdapat berbagai faktor yang memengaruhi baik sisi permintaan maupun penawaran tenaga kerja.

c. Definisi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang termasuk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun). Menurut Jayanti & Dewi,(2021), tenaga kerja merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja demi menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk Masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, terdapat dua kategori, yaitu kelompok tenaga kerja dan bukan kelompok tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja terdiri dari mereka yang berada dalam usia kerja, sedangkan kelompok bukan tenaga kerja meliputi mereka yang belum mencapai usia kerja.

Menurut Maryati et al., (2021), Penyerapan tenaga kerja merujuk pada jumlah lapangan kerja yang telah terisi, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja tersebut di berbagai sektor perekonomian dan proses penyerapan ini terjadi karena adanya permintaan akan tenaga kerja. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja dapat dipahami sebagai bentuk permintaan terhadap tenaga kerja.

Secara umum, penyerapan tenaga kerja mencerminkan seberapa besar sebuah Perusahaan mampu menyerap karyawan dalam Upaya memproduksi barang atau jasa. Kemampuan ini bervariasi antar sektor, dengan tiap sektor memiliki karakteristik penyerapan yang berbeda. Selain itu, pengertian tenaga kerja juga

mencakup keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja. Dari segi keahlian dan Pendidikan tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan berikut:

- 1) Tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.
- 2) Tenaga kerja trampil, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dari Pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu dan tukang memperbaiki elektronik.
- 3) Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki Pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti akuntan, ahli ekonomi dan industri, dokter, dan lain-lain.

Jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam mendukung proses produksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja di masyarakat. Calon tenaga kerja ini umumnya terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu mereka yang telah bekerja, mereka yang siap untuk bekerja, dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi, khususnya di Indonesia, di mana pertumbuhan angkatan kerja sering kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Peningkatan dan perbaikan dalam pembangunan ekonomi akan berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang secara langsung berdampak pada ketersediaan tenaga kerja di suatu wilayah. Situasi ketenagakerjaan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor permintaan dan faktor penawaran tenaga kerja.

d. Faktor-Faktor Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Ginting et al., (2025), Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam pasar tenaga kerja maupun dari luar pasar tenaga kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja antara lain sebagai berikut:

1. Upah Minimum

Upah minimum dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja. Upah yang terlalu tinggi berpotensi menambah beban biaya perusahaan, sedangkan upah yang terlalu rendah dapat menurunkan motivasi dan produktivitas pekerja. Oleh karena itu, penetapan upah minimum yang seimbang menjadi faktor penting dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan output suatu daerah. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa bertambah, sehingga perusahaan cenderung memperluas usahanya dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan tenaga kerja memengaruhi kualitas dan produktivitasnya. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Namun, ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja juga dapat menjadi hambatan dalam penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor formal.

4. Investasi

Investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Semakin tinggi investasi yang masuk, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya ekspansi usaha yang membutuhkan tambahan tenaga kerja.

5. Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi dapat berdampak dua sisi terhadap penyerapan tenaga kerja. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun di sisi lain dapat menggantikan tenaga kerja manusia (otomatisasi). Oleh karena itu, sektor yang terdampak teknologi tinggi mungkin mengalami pengurangan tenaga kerja, sementara sektor berbasis teknologi digital dapat membuka jenis pekerjaan baru.

6. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, perpajakan, pelatihan kerja, serta regulasi investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap iklim usaha dan ketersediaan lapangan kerja. Program-program seperti pelatihan vokasi, pemberdayaan UMKM, dan insentif pajak dapat meningkatkan daya serap pasar tenaga kerja.

e. Pasar Tenaga Kerja

Menurut Afrison HN, (2023), Pasar tenaga kerja merupakan salah satu aspek krusial dalam perekonomian. Perubahan struktur ekonomi, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap bidang ketenagakerjaan. Salah satu fenomena yang saat ini berpengaruh

besar adalah digitalisasi. Digitalisasi telah secara fundamental mengubah cara kerja, tuntutan keterampilan, serta dinamika dalam pasar tenaga kerja.

Pasar tenaga kerja berfungsi sebagai mekanisme yang menentukan jumlah tenaga kerja yang diserap, tingkat upah, dan distribusi pekerjaan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing pihak. Penawaran tenaga kerja berasal dari individu atau kelompok usia produktif yang siap dan bersedia bekerja, sedangkan permintaan tenaga kerja berasal dari sektor usaha atau industri yang membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung proses produksi. Pasar tenaga kerja tidak hanya mencerminkan aspek kuantitatif seperti jumlah tenaga kerja yang tersedia dan diserap, tetapi juga mencakup aspek kualitatif seperti produktivitas, efisiensi, serta kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja sangat menentukan tingkat pengangguran dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan (Hijriah Hanifiyah Yuliatul Adiba Maya Elfira, 2019).

7. Upah Minimum

a. Pengertian Upah Minimum

Menuru Insana & Ahmad Kafrawi Mahmud, (2021), Dalam Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 mengenai perubahan, pasal 1 ayat (1) mendefinisikan upah sebagai hak yang diterima oleh pekerja atau buruh, yang dinyatakan dalam bentuk uang. Upah minimum adalah suatu yang diterima bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuh suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang sudah di tetapkan atas dasar persetujuan atau

peraturan perundang-undang serta dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk kariawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat di tetapkan secara minimum regional, sektor regional, maupun subsektoral, meskipun pada saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang di hasilkan atau banyanya pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai upah yang telah dijelaskan diatas, dapat di simpulkan bahwa upah adalah imbalan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai kompensasi atas jasa yang telah mereka berikan kepada Perusahaan. Besaran upah ini ditentukan berdasarkan jumlah jam kerja dan produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.

b. Dasar Hukum Upah Minimum

Dasar Hukum Cipta Kerja terkait Upah Minimum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pengupahan di Indonesia, termasuk mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Perubahan teknis terkait pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 sebagai revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Berikut Isi Pokok Pengaturan yaitu:

1) Formula Penghitungan Baru

Penetapan UMP/UMK dilakukan dengan mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (α) yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penerapan formula ini bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja/buruh sekaligus mempertahankan daya saing dunia usaha.

2) Penerapan Upah Minimum

Upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Namun, perusahaan dapat memberikan upah lebih tinggi apabila pekerja/buruh memiliki kualifikasi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan. Penyesuaian UMP/UMK dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh gubernur.

3) Penguatan Peran Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota diberikan peran yang lebih besar dalam proses perhitungan dan pemberian rekomendasi penetapan upah minimum.

4) Pengaturan Daerah Baru dan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pengaturan khusus diberikan untuk penetapan upah minimum di wilayah hasil pemekaran dan di Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk penyesuaian pada tahun-tahun berikutnya (PP No 36, 2021).

c. Rumus Perhitungan Upah Minimum

Dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16, BAB II Pasal 2 Mengenai Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, peraturan tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Gubernur memiliki tanggung jawab untuk menetapkan Upah Minimum di tingkat provinsi.
- 2) Penetapan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2025 akan dilakukan dengan menggunakan perhitungan berdasarkan rumus berikut:

$$\text{UMP2025} = \text{UMP2024} + \text{Kenaikan UMP2025}$$

Dokumen ini telah divalidasi secara digital oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penjelasan :

UMP2025 : Upah Minimum Provinsi yang berlaku pada tahun 2025

UMP2024 : Upah Minimum Provinsi yang berlaku pada tahun 2024

Kenaikan UMP 2025 : Besaran peningkatan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2025

- 3) Jumlah kenaikan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam ayat (2), ditetapkan sebesar 6,5% dari Upah Minimum Provinsi tahun 2024.
- 4) Persentase kenaikan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2025 sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3), ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut:
 - a) Kondisi pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi; dan
 - c) penggunaan indeks tertentu

d) Indeks tertentu yang dimaksud dalam ayat (4) huruf c merujuk pada variabel yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, dengan tetap memperhatikan kepentingan dunia usaha dan pekerja/buruh, serta menerapkan prinsip proporsionalitas guna menjamin pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh (Ketenagakerjaan, 2025).

8. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dalam satu periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi secara umum diartikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Menurut Rukminingsih et al., (2020), “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam Masyarakat bertambah dan kemakmuran Masyarakat meningkat”. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode lain.

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses peningkatan output perkapita dalam jangka Panjang. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis Pembangunan ekonomi di suatu negara. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mencerminkan seberapa besar aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan bagi Masyarakat dalam suatu periode tertentu.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang di pelopori oleh adam smith di dalam Regina, (2022), menjelaskan bahwa perkembangan output akan sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dalam pandangan ini, harga dan jumlah produk bergantung pada tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penduduk dianggap sebagai faktor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Regina, (2022), Teori ini secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa semakin banyak jumlah penduduk, maka Tingkat ekonomi juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan pepatah “banyak anak banyak rezeki”, yang menunjukkan bahwa dalam satu keluarga semakin banyak anak berarti juga semakin banyak tenaga kerja yang dapat di optimalkan. Dengan demikian, hal ini berpotensi meningkatkan perekonomian keluarga tersebut.

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori pertumbuhan neoklasik mulai berkembang sejak tahun 1950 dan mengalami perkembangan berkat analisis-analisis yang diambil dari pandangan teorisebelumnya, yaitu teori ekonomi klasik. Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Abramovitas dan Solow dalam yang menganalisis pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang penawaran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor produksi.selain itu, kemajuan teknologi, keahlian tenaga kerja, dan peningkatan keterampilan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses tersebut (Regina, 2022).

Pandangan teori ekonomi neo klasik juga dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y=f(K,L,t).....(2.1)$$

Keterangan:

- 1) Y: Tingkat pertumbuhan ekonomi
- 2) K: Tingkat pertumbuhan barang modal
- 3) L: Tingkat pertumbuhan tenaga kerja
- 4) t: Tingkat pertumbuhan teknologi

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa faktor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi mencakup akumulasi modal, penambahan jumlah penduduk, serta perkembangan teknologi. Pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai hasil interaksi antara berbagai faktor produksi. Volume barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian sangat dipengaruhi oleh jumlah input yang tersedia, seperti modal, tenaga kerja, dan tingkat produktivitas dari masing-masing input tersebut.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:

1) Sumber Daya Alam

Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti lahan, hutan, mineral, dan energi menjadi modal utama dalam kegiatan produksi. Pengelolaan yang efisien dapat meningkatkan output dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas tenaga kerja memegang peranan penting. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja sangat menentukan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa.

3) Modal Fisik (Capital)

Tersedianya modal dalam bentuk peralatan, mesin, infrastruktur, dan teknologi mendukung kelancaran proses produksi serta meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi.

4) Teknologi

Inovasi dan kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, dan membuka peluang usaha baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

5) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan pengupahan yang tepat dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan.

6) Stabilitas Politik dan Keamanan

Lingkungan politik dan keamanan yang stabil meningkatkan kepercayaan investor, memperlancar perdagangan, dan mendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi.

7) Kondisi Pasar dan Permintaan

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh besarnya permintaan domestik maupun internasional terhadap barang dan jasa yang dihasilkan.

e. Rumus Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung berdasarkan harga konstan (ADHK) (Dwi Puspa, 2016).

$$G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$$

Keterangan :

G : Pertumbuhan Ekonomi
PDRB1 : PDRB tahun ini
PDRB0 : PDRB tahun sebelumnya

9. Tingkat Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Menurut Silalahi et al., (2023), Pendidikan merupakan salah satu aspek Pembangunan bagi bangsa yang sangat penting agar dapat mewujudkan sumberdaya manusia dan bangsa watak yang baik. Pendidikan merupakan instrument utama dalam meningkatkan kapasitas manusia untuk mendorong Pembangunan ekonomi. Dalam konteks makro, Pendidikan dapat dipahami sebagai kekuatan dan dukungan bagi perekonomian yang berkaitan erat dengan jumlah tenaga kerja produktif dan terampil.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan formal yang ditempuh dan diselesaikan oleh seseorang sesuai dengan perkembangan, tujuan pendidikan, dan kemampuan yang ingin dicapai pada setiap jenjangnya. Tingkat pendidikan

mencerminkan jumlah tahun belajar dalam sistem pendidikan formal yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta peluang untuk memperoleh pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemampuan individu dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pasar tenaga kerja (Fish, 2020).

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mencerminkan Tingkat Pendidikan yang dicapai oleh Masyarakat di suatu daerah. Semakin lama orang mengenyam Pendidikan, semakin tinggi pula jenjang Pendidikan yang telah di lalui. Angka ini menghitung rata-rata durasi Pendidikan yang telah di lalui. Penduduk berusia 15 tahun ke atas di semua jenjang Pendidikan formal yang mereka Jalani (Jasmin, 2024).

d. Fungsi Pendidikan

Fungsi Pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradapan bangsa bermartabat, hal ini bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi individu (Ni Putu Suwardani, 2020). Pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai keimanan kepada tuhan yang maha Esa, membentuk akhlak mulia, serta menghasilkan individu yang berilmu, terampil, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

e. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi kualitas Pendidikan seorang, semakin besar pula peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Selain itu, Perusahaan juga membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil,

karena hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi Tingkat Pendidikan di suatu wilayah, semakin besar pula potensi penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mencakup berbagai studi yang telah dilakukan mengenai hubungan antara upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan Tingkat Pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut berfungsi sebagai pendukung yang kuat dalam penelitian ini serta dijadikan acuan untuk memperkuat hasil analisis. Berikut adalah daftar penelitian yang dimaksud:

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Rifaldo Silalahi, Vecky A.J Masinambow, Mauna Th. B. Maramis (2023)	Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota - Kota Di Provinsi Sulawesi Utara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota - kota Provinsi Sulawesi Utara. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari α 0.05.
2	Juardi Juardi, Nurjannah Nurjannah, Bustan Ramli (2024)	Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bulukumba	Hasil pnelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum (X1) berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba, Pendidikan (X2) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba, Pertumbuhan ekonomi (X3) berpengaruh

			signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba.
3	Julia Dwi Budiasih, Kiky Asmara (2024)	Pengaruh Pendidikan, Umk, Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2021	Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terdapat pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten tahun 2012 – 2021, hasil menunjukkan bahwa PDRB berdampak pada peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja. Variabel PDRB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel Tenaga Kerja pada Provinsi Banten tahun 2012 - 2021, yang artinya saat Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten meningkat, maka akan terjadi peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja oleh Perusahaan, Rumah Tangga, dan Lapangan Pekerjaan lainnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sendiri adalah pertambahan nilai barang dan jasa yang diperoleh dalam seluruh sektor disuatu wilayah dalam periode tertentu.
	Nur Ihriza Rahmatin, Sheptia Dwi Imroatus Solekha, Icha Kartika Putri, Aprilia Nilasari,	Pengaruh Upah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Banten Nur	Berdasarkan hasil analisis pada penelitian penarikan kesimpulan dapat dinyatakan bahwa variabel Upah (upah minimum melalui indikator UMK), Pertumbuhan Ekonomi (melalui indikator PDRB) dan Pendidikan (melalui indikator Rata-Rata

	dan Kukuh Arisetyawan (2024)		Lama Sekolah (RLS)) secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi Banten tahun 2019-2023 memiliki pengaruh secara signifikan. Temuan dari penelitian ini memaparkan bahwasanya PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja,
5	Nofrita, Cahyanda, Marwan, (2022)	Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat	Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka didapatkan kesimpulan: Upah minimum, inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat. Yang artinya upah minimum, inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat. Upah minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat. Inflasi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

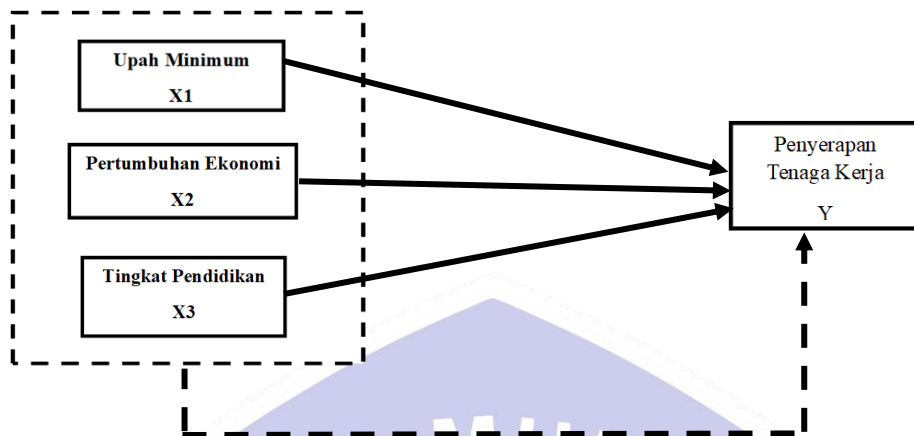
Kerangka konseptual adalah gambaran atau rancangan yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam sebuah penelitian berdasarkan teori dan konsep yang relevan. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam menjelaskan bagaimana variabel-variabel saling berkaitan dan bagaimana hipotesis dibangun. Dalam penelitian, kerangka ini biasanya menerapkan pendekatan ilmiah serta menjelaskan hubungan antara berbagai variabel dalam analisis yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penyerapan tenaga kerja (Y) dipengaruhi oleh tiga variabel independen, yaitu upah minimum (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), dan tingkat pendidikan (X3). Ketiga variabel ini diyakini memiliki peranan penting dalam menentukan tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang terserap di suatu wilayah. Secara konseptual, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

X1 → Y: Upah Minimum memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja.

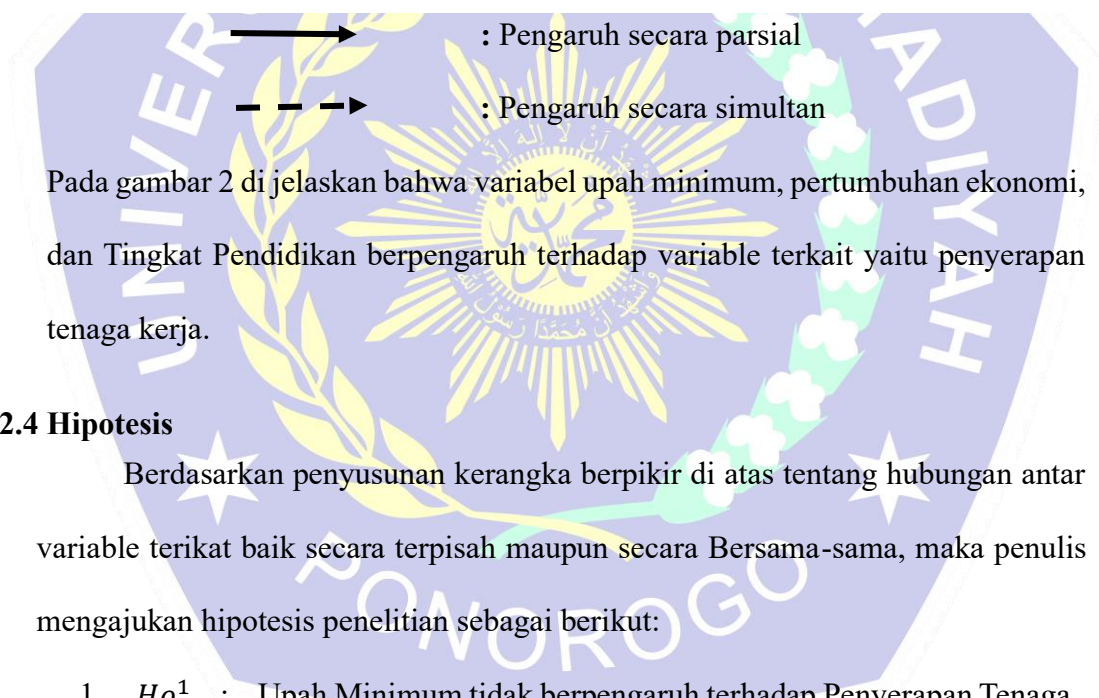
X2 → Y: Pertumbuhan Ekonomi memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja.

X3 → Y: Tingkat Pendidikan memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja.

Selanjutnya dibuat gambar kerangka berfikir maka dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan taingkat pendidikan berikut gambaranya:



Gambar 1 Kerangka Berfikir Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur



2.4 Hipotesis

Berdasarkan penyusunan kerangka berpikir di atas tentang hubungan antar variable terikat baik secara terpisah maupun secara Bersama-sama, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H_0^1 : Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur
 H_a^1 : Upah Minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur

2. H_0^2 : Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur

H_a^2 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur

3. H_0^3 : Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur

H_a^3 : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur

4. H_0^4 : Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur

H_a^4 : Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur